

**ANALISIS DETERMINASI PENYUSUNAN APBD
BERBASIS KINERJA
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Eko Sulisty
NPM. 15.0102.0209

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

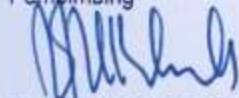
Eko Sulistyo

NPM 15.0102.0209

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Februari 2018

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Nur Laila Yuliani, SE M.Sc

Pembimbing I



Yulinda Devi Pramita, SE, M.Sc

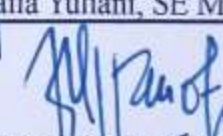
Pembimbing II

Tim Penguji



Nur Laila Yuliani, SE M.Sc

Ketua



Muji Mranani, SE, M.Si, AK, CA

Sekretaris



Farida, SE, M.Si, AK, CA

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1



1 APR 2018

Tanggal

Dra. Martina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Sulistyo

NIM : 15.0102.0209

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

ANALISIS DETERMINASI PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Magelang)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 9 Maret 2018

Pembuat Pernyataan



Eko Sulistyo

NIM. 15.0102.0209

RIWAYAT HIDUP

Nama : Eko Sulistyo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 29 Maret 1975
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat Rumah : Wates Tengah RT 1 RW 2, Wates
Magelang Utara, Magelang
Alamat Email : ekoiling@yahoo.co.id

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (1981 - 1987) : SD Negeri Cacaban 2 Kota Magelang
SMP (1987 - 1990) : SMP Negeri 6 Kota Magelang
SMA (1990 - 1993) : SMA Negeri 4 Kota Magelang
Perguruan Tinggi (2011 - 2014) : D3 Program Studi Akuntansi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMAK) Universitas Gadjah Mada (1998-2000)

Magelang, 9 Maret 2018



Eko Sulistyo
NIM. 15.0102.0209

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.
(HR. Turmudzi)

“Berdoa, Berikhtiar, Berserah Diri, Bersabar, Bersyukur dan Berbagi
Berdasar Keikhlasan untuk hidup yang lebih baik” (Motto Pribadi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DETERMINASI PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (Studi Empris pada Pemerintah Kota Magelang).”**

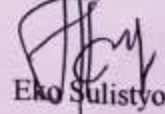
Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Marlina Kurnia., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. Sekaligus selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang dan sebagai penguji yang sudah membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
3. Ibu Yulinda Devi. P, S.E, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini
4. Ibu Muji Mranani, S.E., M.Si. AK. CA selaku penguji yang sudah membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Farida, S.E., M.Si. AK. CA selaku penguji yang sudah membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Bapak Drs. Joko Budiyono, MM. Selaku Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang telah memberikan ijin atas penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Magelang yang telah memberikan ijin atas penelitian ini..
8. Bapak (Alm.) Soekardjo dan Ibu Asriati selaku orang tua saya yang telah memberikan semangat dan doa di setiap langkah saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Istri saya Iwing Sulistiyawati yang sholihah dan istiqomah telah penuh emosi mendorong saya serta setia menemani proses penyusunan skripsi ini dengan doa dan kopinya yang pas takarannya.
10. Anak-anak saya yang tercinta telah yang telah mengorbankan waktunya untuk pergi bersama karena waktu saya tcurahkan untuk penyelesaian skripsi ini.

Magelang, 9 Maret 2018

Penulis


Eko Sulisty

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Riwayat Hidup.....	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	9
1. Teori keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	9
2. Analisis Standar Belanja	11
3. Standar Pelayanan Minimum	12
4. Indikator Kinerja.....	14
5. Partisipasi Masyarakat.....	16
6. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja	19
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	20
C. Perumusan Hipotesis.....	22
D. Model penelitian.....	27
 BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel.....	28
B. <i>Pilot Study</i>	28
C. Data Penelitian	29
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	30
E. Metode Analisis Data	33
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Responden.....	38
B. <i>Pilot Study</i>	38
C. Pengumpulan Data	40
1. Statistik Deskriptif Responden.....	41
2. Statistik Deskriptif Variabel.....	42

D. Analisis Data	44
1. Uji Validitas.....	44
2. Uji Reliabilitas.....	46
3. Analisis Regresi Linier Berganda	47
E. Pengujian Hipotesis.....	48
1. Uji Determinasi	48
2. Uji F.....	49
3. Uji t.....	50
F. Pembahasan.....	52
 BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	57
B. Keterbatasan Penelitian.....	57
C. Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1	<i>Cross Loading Pilot Study</i>	39
Tabel 4.2	Uji Reliabilitas <i>Pilot Study</i>	40
Tabel 4.3	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	41
Tabel 4.4	Profil Responden.....	41
Tabel 4.5	Hasil Statistik Deskriptif Variabel	43
Tabel 4.6	<i>Cross Loading</i> Penelitian	45
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas.....	46
Tabel 4.8	Regresi Linier Penyusunan APBD Berbasis Kinerja.....	47
Tabel 4.9	Uji Determinasi Penyusunan APBD Berbasis Kinerja	48
Tabel 4.10	Uji F Penyusunan APBD Berbasis Kinerja	49
Tabel 4.11	Uji t Penyusunan APBD Berbasis Kinerja.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian Penyusunan APBD Berbasis Kinerja	27
Gambar 3.1 Nilai Kritis Uji F	36
Gambar 3.2 Uji t (Penerimaan Uji Hipotesis Positif)	37
Gambar 4.1 Uji F Penyusunan APBD Berbasis Kinerja	49
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan Hipotesis1	50
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan Hipotesis2	51
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan Hipotesis3	51
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan Hipotesis4	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner penelitian (<i>pilot test</i>).....	63
Lampiran 2	Kuesioner penelitian.....	67
Lampiran 3	Daftar responden.....	71
Lampiran 4	Tabulasi Hasil Kuisisioner (<i>pilot study</i>).....	73
Lampiran 5	Tabulasi Hasil Kuisisioner penelitian.....	75

ANALISIS DETERMINASI PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Magelang)

Eko Sulistyio
NPM 15.0102.0209

Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penguatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja, yang terdiri dari Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimum, Indikator Kinerja, Partisipasi Masyarakat dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah Kota Magelang. Sampel penelitian sebanyak 147 orang yang diambil secara *purposive sampling*. Responden terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah, kepala sub bagian program, kepala bidang atau yang setara, yang secara struktural bertanggung jawab dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis standar belanja, indikator kinerja dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, sedangkan standar pelayanan minimum tidak berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

Kata kunci : *Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimum, Indikator Kinerja, partisipasi masyarakat, penyusunan anggaran berbasis kinerja, regresi linier berganda.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi dan akuntabilitas publik pada era otonomi daerah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas publik tersebut tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia saja, namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas lembaga sektor publiknya. Di Indonesia, komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai disuarakan sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penguatan hukum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat. Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran

yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil atau manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Magelang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang, bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya.

Pemerintah Kota Magelang melakukan optimalisasi fungsi rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Rakor-POK) untuk melihat penyerapan anggaran dan fisik sekaligus melihat capaian indikator sasaran (*outcome*) sehingga keteringgalan realisasi baik dari sisi keuangan maupun fisik kegiatan akan bisa dikejar dalam sisa waktu yang ada.

Salah satu persoalan utama Belanja Daerah Kota Magelang adalah belum dilakukannya secara optimal perhitungan kontribusi penyerapan belanja daerah terhadap pencapaian indikator sasaran. Sehingga walaupun tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 terjadi peningkatan persentase realisasi belanja 50,01% - 75,00% yaitu dari 7,02% menjadi 8,12% namun untuk persentase realisasi belanja 75,01% - 100% tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 terjadi penurunan dari 88,92% menjadi 88,66% atau turun sebesar 0,26% (LKPD Walikota Magelang Akhir Tahun 2016). Hal itu dikarenakan

adanya rekening belanja pada satu atau lebih kegiatan yang tidak dibelanjakan atau dibelanjakan sebagian.

Berdasarkan realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa kinerja Pemerintah Kota Magelang masih belum optimal. Namun realisasi anggaran program dan kegiatan tidak hanya karena faktor kinerja pelaksana program dan kegiatan yang belum baik, dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diterapkan Pemerintah Kota Magelang masih perlu perbaikan dari awal pengusulan oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, yaitu penentuan indikator sasaran (*outcome*) maupun Analisis Standar Belanja yang ditetapkan apakah sudah diterapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan perencanaan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2009) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja menunjukkan bahwa komponen seluruh organisasi, penyempurnaan sistem, administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi yang tegas berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Penelitian Asropi (2007) menunjukkan bahwa indikator kinerja berpengaruh positif terhadap sistem pelayanan publik. Nuraeni (2009) tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah Kabupaten Temanggung menyimpulkan bahwa belum ada kejelasan tentang penggunaan standar analisis belanja dalam proses penyusunan anggaran

berbasis kinerja pada pemerintah Kabupaten Temanggung, namun proses penyusunan anggaran berbasis kinerja tetap berjalan.

Fitri, dkk (2013) tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya, *Reward*, dan *Punishment* Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja hasilnya adalah secara parsial, kualitas sumber daya dan *reward* berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Sedangkan, komitmen organisasi dan *punishment* tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Lain halnya dengan gaya kepemimpinan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Secara simultan, variabel gaya kepemimpinan, komitmen seluruh komponen organisasi, kualitas sumber daya, *reward*, dan *punishment* berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja.

Yandra, dkk (2013) tentang Penyusunan APBD Berbasis Kinerja menghasilkan secara simultan komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, sistem *reward* dan *punishment* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, sedangkan komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi dan sumber daya yang cukup secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Dari beberapa faktor tersebut yang berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja adalah sistem *reward* dan *punishment*.

Penelitian oleh Anggita(2017) tentang pengaruh analisis standar belanja, standar pelayanan minimum dan indikator kinerja terhadap

penyusunan anggaran berbasis kinerja (studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang) menghasilkan variabel Analisis Standar Belanja tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Pangkalpinang, variabel Standar Pelayanan Minimal berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Pangkalpinang, variabel Indikator Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggita(2017) dengan perbedaan **pertama** menambah variabel partisipasi masyarakat. Penambahan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam penyusunan APBD berbasis kinerja, karena partisipasi masyarakat seperti tercantum dalam Bab VIII pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengamanahkan serta mengatur dengan jelas dan tegas bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 dan SEB Mendagri-Bappenas. Menciptakan orientasi anggaran ke arah kesejahteraan rakyat diperlukan penganggaran yang partisipatif (*Participatory Budgeting*). *Participatory Budgeting (PB)* adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan APBD maka akan diketahui permasalahan dalam masyarakat bisa secara langsung

sehingga penganggaran akan bisa lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian penetapan indikator *outcome* menjadi lebih tepat.

Perbedaan **kedua** adalah lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Magelang karena Pemerintah Kota Magelang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 59 tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang, bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja, perlu adanya penilaian kewajaran atas setiap usulan program dan kegiatan serta alokasi anggrannya

B. Rumusan Masalah

1. Apakah analisis standar belanja berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja?
2. Apakah standar pelayanan minimum berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja?
3. Apakah indikator kinerja berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh analisis standar belanja terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
2. Menganalisis pengaruh standar pelayanan minimum terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

3. Menganalisis pengaruh indikator kinerja terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.
4. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah, penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan, atau masukan dan sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran.
3. Bagi Akademis, penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian dan referensi bagi para akademis sebagai sarana pengembangan bidang anggaran berbasis kinerja, perencanaan program dan kegiatan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu gambaran yang jelas tentang urutan penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi uraian tentang telaah teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk menerangkan dan menguraikan tentang populasi dan sampel, data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif responden, uji kualitas data dan uji hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini meliputi uraian mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “*nexus of contract*”. Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi ataukah perilaku opportunistik bagi si Agen.

Pada organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif rakyat. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan dari pada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

Masalah keagenan yang timbul dikalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan utiliti (*self-interest*) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan "budgetary slack". Hal ini terjadi dikarenakan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan masyarakat. Namun demikian *budgetary slack* APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (*self interest*) ketimbang untuk kepentingan masyarakat.

Kalau kondisi di atas terjadi, maka proses penyusunan atau perubahan anggaran APBD yang semestiy akan menghasilkan *outcome* yang efisien dan efektif dari alokasi sumber daya dalam anggaran akan terdistorsi karena adanya perilaku oportunistik untuk kepentingan pribadi.

Penelitian Safi', dkk (2015) menyakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran *urgent* untuk dilakukan, agar masyarakat mempunyai kesempatan yang berkekuatan dan berkepastian hukum untuk mengawal penganggaran yang pro-rakyat.

2. Analisis Standar Belanja

Selain proses penyusunan yang harus melibatkan banyak pihak, kriteria APBD yang disusun berdasarkan anggaran kinerja adalah dikembangkannya Analisis Standar Belanja (ASB), yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 (1) b menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Analisis Standar Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ASB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu tahun anggaran.

3. Standar Pelayanan Minimal

Pasal 1 (ayat 17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal dibentuk untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyatakan bahwa Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Warella (dalam Pasolong, 2008) menyatakan bahwa pelayanan (*service*) adalah sebagai suatu perbuatan (*deed*), suatu kinerja

(*performance*) atau suatu usaha (*effort*). Menurut Ivancevich (dalam Pasolong, 2008) menyatakan bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Sedangkan menurut Gronross (dalam Pasolong, 2008), menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan pegawai atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu:

Pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan; kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Dengan demikian pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara

terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

4. Indikator Kinerja

Menurut Green (1992) indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan. Menurut Wilson & Sapanuchart (1993) indikator merupakan pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Menurut Tjitrosoemarto (2011) indikator kinerja merupakan gambaran, ciri-ciri, atau ukuran yang menggambarkan status kinerja yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu proses. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut:

a) Biaya pelayanan (*cost of service*)

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena *output* yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan

yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi, misalnya belanja per kapita.

b) Penggunaan (*utilization*)

Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu, misalnya persentase penggunaan kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.

c) Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)

Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.

d) Cakupan pelayanan (*coverage*)

Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan

untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

e) Kepuasan (*satisfaction*)

Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjangkauan aspirasi masyarakat (*need assessment*), dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerja sama antar unit kerja.

5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Mardiasmo (2009:32) pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat yang demokratis rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat tersebut melalui kebijakan dan program yang memberi mamfaat lebih kepada pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah tidak mungkin memenuhi semua permintaan *stake holdernya* secara simultan, tetapi pemerintah akan memilih program yang menjadi prioritas. Disinilah fungsi anggaran yang akan digunakan sebagai alat politis dalam memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

Secara umum partisipasi bisa dipahami dalam dua pandangan utama, yaitu perspektif teori pluralisme dan demokrasi langsung. Dalam

perspektif pertama, konsep partisipasi lebih difokuskan pada representasi kepentingan, terutama melalui kelompok-kelompok kepentingan dan struktur politik lainnya. Sementara untuk yang kedua, partisipasi merupakan sebuah bentuk keterlibatan dan pengaruh langsung individu atas pengambilan sebuah keputusan (Mayer, 1997). Pada umumnya tema-tema partisipasi di tingkat lokal sangat berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat populer dikalangan masyarakat, LSM serta kalangan akademisi. Musrenbang adalah forum bagi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dengan pola *bottom up*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengelola Musrenbang merupakan wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya mempunyai kewenangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan kelurahan, merupakan jaminan adanya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang ada di kelurahan (Suwondo, 2000). Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah mempertegas bahwa partisipasi menjadi kata kunci hampir di segala aktivitas pembangunan. Problem nyata yang dihadapi adalah ternyata mekanisme partisipasi yang ada tidak cukup memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena

partisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi yang semu, simbolis penuh dengan manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa menjamin proses penganggaran, berdasarkan *people need assessment*. Yang dominan justru *government need assessment*. Artinya, masyarakat tidak dilibatkan dan terlibat secara penuh hingga pengambilan keputusan. Keputusan tentang program hanyalah hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Sehingga program-program pembangunan yang dihasilkan, bisa dikatakan kurang bermanfaat untuk publik secara umum.

Perencanaan anggaran partisipatif (*participatory budgeting*), adalah sebuah proses perencanaan anggaran belanja, dengan keputusan tentang alokasi anggaran ada ditangan publik. Dalam prosesnya publik berpartisipasi secara otonom. Partisipasi dilakukan dengan berbagai forum, di mana posisi publik mampu mengontrol dan mengarahkan pemerintah daerah, dalam penentuan kebijakan alokasi anggaran. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran partisipatif, tetap pemerintah daerah. Namun dalam prosesnya, sepenuhnya publik yang berperan. Dari mulai penyampaian usulan hingga penentuan alokasi anggaran.

Seperti halnya perencanaan, prosedur penganggaran sangat tergantung pada sistem politik, sosial dan tata pemerintahan suatu negara. Dalam konteks itu, setidaknya terdapat empat tipe praktik penganggaran yang menandakan adanya empat paradigma perencanaan yang berbeda. Pertama, prosedur penganggaran menekankan pada peran pemerintah

dalam melakukan proses siklikal dari awal sampai akhir melalui suatu mekanisme kenegaraan. Kedua, prosedur penganggaran yang menekankan pada peran masyarakat melalui mekanisme kesepakatan sosial dan mekanisme pasar. Ketiga, prosedur penganggaran yang menekankan pada peran para ahli pengelolaan sumber daya. Keempat, Prosedur penganggaran yang menekankan pada peran para aktivis sebagai pengorganisasi masyarakat dan pengontrol pemerintah.

6. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah - DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses pembuatan APBD dimulai dengan ditetapkannya Perda tentang Rancangan APBD (RAPBD) yang berisi penganggaran atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. RAPBD disampaikan ke Provinsi/Departemen Dalam Negeri untuk dievaluasi. Jika ada perbaikan atau revisi atas RAPBD tersebut maka akan diperbaiki atau dikoreksi oleh badan eksekutif pemerintah daerah. Setelah dilakukan perbaikan atau revisi atas evaluasi oleh Provinsi atau Departemen Dalam Negeri terhadap RAPBD setiap Pemerintah Daerah maka dokumen disahkan atau disetujui oleh DPRD. Pengesahan dari DPRD setiap Pemerintah Daerah menandakan bahwa RAPBD berubah menjadi dokumen APBD sehingga APBD dapat dicairkan atau direalisasikan sesuai dengan

kebutuhan operasional pemerintah daerah maupun pembangunan daerah dalam sektor publik.

Anggaran berbasis kinerja adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Kurniawan (2012)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris Pada DPRD Kota Surakarta Jawa Tengah)	Partisipasi masyarakat , transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik, pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.
2	Fitri, dkk (2013)	Pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Lombok Barat	Gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
3	Yandra dan Sutrisna (2013)	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Siak	Gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, reward dan punishment berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja
4	Rumenser (2014)	Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kota Manado	Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran
4	Jumame, dkk (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja di Pemerintah Kota Sorong	Gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berpengaruh signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja
5	Anggita (2017)	Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimum dan Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di OPD Kota Pangkalpinang	Analisi standar belanja tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kota Pangkalpinang, standar pelayanan minimum berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kota Pangkalpinang, Indikator Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kota Pangkalpinang

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Analisis Standar Belanja terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja

Manik, Rusman R. (2013) mengatakan bahwa analisis standar belanja merupakan kewajiban atas beban kerja dengan biaya yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga dari definisi tersebut terdapat tiga (3) aspek yang dinilai pada sebuah kegiatan, yaitu: apakah beban kerja wajar, apakah biaya yang dianggarkan wajar, apakah biaya wajar untuk beban kerja tersebut.

Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKA-OPD berdasarkan prestasi kerja salah satunya berdasarkan Analisis Standar Belanja yang merupakan penilaian kewajiban atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Hasil penelitian Anggita (2017) menyatakan bahwa analisis standar belanja berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam di bidang anggaran yang memahami instrumen-instrumen penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan baik agar setiap instrumen tersebut dapat saling melengkapi dan lebih efektif dalam menyusun anggaran yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Analisis standar belanja berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

2. Pengaruh standar pelayanan minimum terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah 65 / 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu: pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan; kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan yang bermutu atau berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki

secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu bahwa Kebijakan Standar Pelayanan Minimal pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 ayat (4) UU No. 32/2004 yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah”. Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Standar Pelayanan Minimal adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tertanggal 28 Desember 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007.

Hasil penelitian Anggita (2017) menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Standar Pelayanan Minimum berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja

3. Pengaruh Indikator Kinerja terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan

yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2017) hasilnya menyatakan bahwa indikator kinerja berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Indikator Kinerja berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja

4. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja

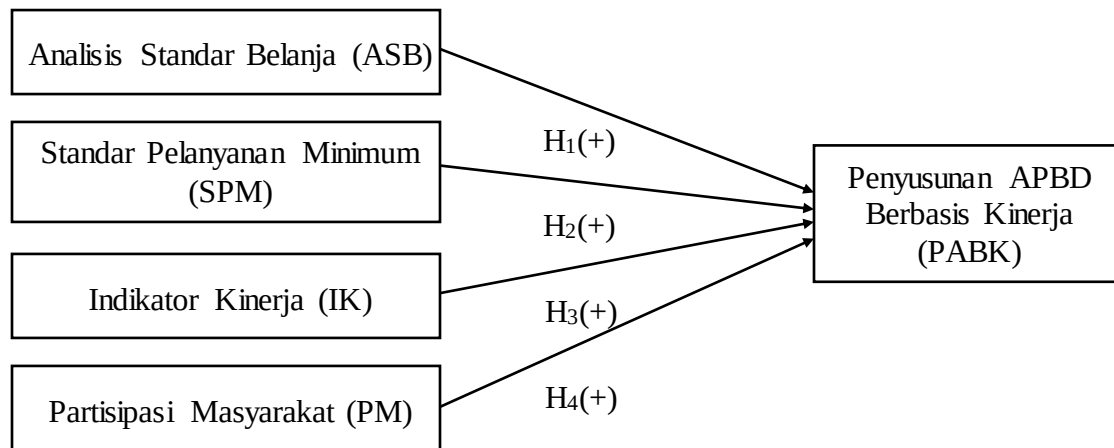
Proses penyusunan anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode *top down* dan *bottom up*. Penyusunan anggaran di sektor pemerintahan menggunakan metode *bottom up*. *Bottom up* merupakan metode penyusunan anggaran yang dilaksanakan dari tingkat bawah ke tingkat yang paling atas atau puncak. Proses penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah disebut dengan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang dilakukan dari Musrenbang tingkat desa hingga Musrenbang tingkat nasional (Pemerintah Pusat Jakarta). Musrenbang tingkat desa atau kelurahan

(Musrenbang Kelurahan) membicarakan mengenai kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa atau kelurahan tersebut untuk dapat direncanakan dan dibantu oleh pemerintah. Musrenbang yang dilakukan tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) membicarakan usulan dari desa atau kelurahan yang nantinya layak diajukan saat musrenbang kabupaten, serta apakah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah disepakatikan melihat kecukupan dana publik yang tersedia.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2012) hasilnya partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. SKB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ tahun 2005 tahapannya sudah berjalan sesuai norma yang ada, akan tetapi saluran aspirasi ini tidak berfungsi maksimal karena pola pikir masyarakat pada umumnya terhadap APBD hanya berkisar seputar pembangunan fisik. Mekanisme jaring aspirasi di Kabupaten Bangkalan dalam Musrenbang tidak mengatur subyek sebagai sumber partisipan pembangunan apakah terbuka untuk umum atau keterwakilan saja (melalui kelembagaan baik yang bersifat formal maupun swadaya masyarakat). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang dalam hal ini yang terkait dengan penyusunan program dan kegiatan beserta anggarannya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh dinas Pemerintah Kota Magelang yaitu sebanyak 54 OPD dengan responden 214 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data suatu penelitian yang diharapkan mampu mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Metode ini memiliki arti bahwa, pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik atau kriteria yang dimiliki sampel dengan pertimbangan disesuaikan dengan objek penelitian untuk meningkatkan ketepatan sampel. Kriteria yang digunakan untuk dijadikan sampel adalah pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD berbasis kinerja, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Bidang atau yang setara yang secara struktural bertanggung jawab dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

B. Pilot Study

Pilot study merupakan uji coba penelitian dalam skala kecil yang dilakukan sebelum penelitian sebenarnya dilaksanakan. Menurut Surachmad (2009), *pilot study* merupakan studi pendahuluan yang dilakukan untuk

mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Pada *pilot study* terdapat proses pengumpulan berbagai informasi atau data awal terkait dengan rencana penelitian baik penelitian lapangan maupun pustaka, yang dilakukan dalam rangka mendalami masalah secara sistematis dan intensif sebagai pendahuluan sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya.

Dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah pegawai yang menempati jabatan struktural, yaitu eselon IV samapai dengan eselon II dan tipe Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu tipe “A”. Maka sampel yang dipilih pada *pilot study* ini adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yaitu sebanyak 40 orang.

C. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu suatu perancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu yang dilakukan dan diamati dengan cermat dan teliti. Jenis data penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan data yang akan dipakai untuk menghasilkan informasi tertentu, dilakukan dengan pemberian suatu daftar pertanyaan dengan indikator masing-masing variabel.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data (Hasan, 2002) yaitu:

- a) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
- b) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.

Kuesioner bersumber dari jawaban responden atas beberapa jumlah pertanyaan tentang analisis standar belanja, standar pelayanan minimum, indikator kinerja, gaya kepemimpinan serta penyusunan APBD berbasis kinerja. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan mendatangi langsung wilayah sampel dalam penelitian. Bentuk kuesioner terdiri dari kuesioner dengan indikator variabel. Penggunaan dua metode tersebut, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Filosofi analisis standar belanja adalah suatu hasil analisis yang memberikan informasi mengenai beban kerja yang wajar dan belanja yang wajar dari suatu kegiatan yang direncanakan. Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian Anggita (2017). Terdapat enam pernyataan dengan indikator Target kinerja, Jenis dan kuantitas sumber daya, Tujuan dan sasaran, Program-program, Kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Masing-masing item pernyataan diukur

menggunakan skala *Likert* 5 poin dengan skor 1=Sangat Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju.

2. Standar Pelayanan Minimum

Manurut Undang-Undang 23 tahun 2014 pengertian standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian Anggita (2017). Terdapat lima pernyataan dengan indikator yang terdiri dari: Kesederhanaan, Kejelasan dan kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan yang merata, ketepatan waktu..Masing-masing item pernyataan diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin dengan skor 1=Sangat Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju.

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian Anggita (2017). Terdapat empat pernyataan dengan indikator sebagai berikut: indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan.Masing-

masing item pernyataan diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin dengan skor 1=Sangat Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju.

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007: 27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Instrumen yang digunakan mengacu pada penelitian Arif Kurniawan (2012). Terdapat tujuh pernyataan dengan indikator sebagai berikut: keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, kesediaan dalam memberikan data dan informasi, keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Masing-masing item pernyataan diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin dengan skor 1=Sangat Tidak Setuju sampai dengan 5 = Sangat Setuju.

5. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Penyusunan APBD berbasis kinerja adalah tersusunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja dari suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya. Variabel APBD berbasis kinerja terdiri dari tujuh pernyataan diukur berdasarkan instrumen Sembiring (2009) dinilai dengan menggunakan skala likert 5 poin yaitu untuk skor 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (tidak tahu), 2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju). Instrumen yang

digunakan untuk mengukur variabel APBD berbasis kinerja berupa 7 pernyataan.

E. Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang menggambarkan sekumpulan data pengamatan untuk menyederhanakan, meringkas dan menyajikan informasi yang lebih menarik, berguna dan mudah dipahami. Analisis ini digunakan untuk mengetahui profil tanggapannya atas variabel penelitian yang diajukan melalui instrumen penelitian (kuesioner).

Ghozali (2016) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi)

2. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai *loading* yang tinggi.

Asumsi yang mendasari digunakannya analisis faktor adalah data matriks harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Bartlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor masalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0.50 dan *cross loading* > 0.40 untuk dapat dilakukan analisis (Hair, dkk, 2006)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Pengujian dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.70 (Nunnally, 1960) dalam (Ghozali, 2016).

3. Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui adanya kontribusi yang diberikan atau pengaruh variabel bebas, yaitu: analisis standar belanja, standar pelayanan minimum, indikator kinerja, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel terikat, penyusunan APBD berbasis kinerja. Analisis regresi digunakan untuk memperoleh suatu persamaan dan

garis yang menunjukkan persamaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Rumus persamaanya adalah:

$$PABK = \alpha + \beta_1 ASB + \beta_2 SPM + \beta_3 IK + \beta_4 PM + e$$

Keterangan	=
PABK	= Penyusunan APBD berbasis kinerja
α	= Konstanta
ASB	= Analisis standar belanja
SPM	= Standar pelayanan minimum
IK	= Indikator Kinerja
PM	= Partisipasi Masyarakat
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien variabel regresi
e	= Error

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Determinasi

Uji determinasi R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari koefisien determinasi ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari sebuah variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y, yang sisanya dapat dinyatakan pula dalam persentase (Ghozali 2016).

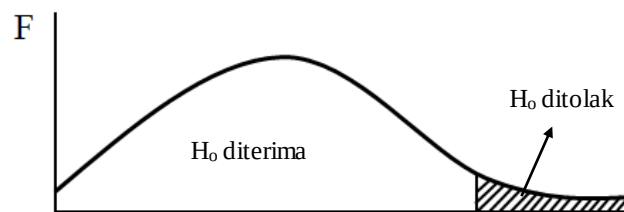
Alasan menggunakan *adjusted* R^2 karena jika terdapat tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli Apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Penggunaan nilai *adjusted* R^2 digunakan pada saat mengevaluasi model

regresi yang terbaik, karena nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun jika satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

b. Uji F

Menurut Ghozali (2016) uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah cocok atau tidak. Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara F hitung dan F tabel. Tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) = k dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = n-k-1. Kriteria penentuan uji F adalah:

- 1) Jika F hitung > F tabel atau $p\text{-value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model penelitian dapat dikatakan fit atau bagus.
- 2) F hitung < F tabel atau $p\text{-value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya model penelitian dapat dikatakan tidak fit atau tidak bagus.

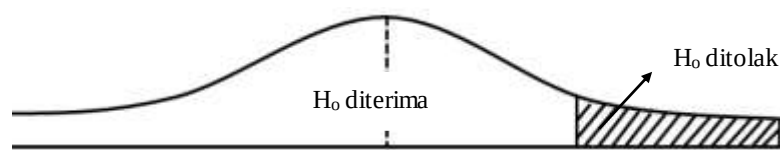


Gambar 3.1
Nilai Kritis Uji F

c. Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan variabel independen secara individu atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). *Level of significants* pada taraf 5% dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df = n-1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*). Kriteria penerimaan hipotesis positif ialah:

- 1) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $p\text{value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $p\text{value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t (Penerimaan Uji Hipotesis Positif)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi penyusunan APBD berbasis kinerja. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Magelang dengan jumlah sampel 147 pegawai. Berikut kesimpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan:

1. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa analisis standar belanja, inikator kinerja, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, walaupun dalam pengujian menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini ialah model yang bagus atau fit.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa analisis standar belanja, indikator kinerja, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, sedangkan standar pelayanan minimum tidak berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

B. Keterbatasan Penelitian dan Hasil

1. Responden yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tidak melibatkan anggota banggar DPRD kota Magelang dari komisi A,B,C, dan D.

2. Belum semua Organisasi perangkat Daerah (OPD) menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
3. Penelitian ini tidak melibatkan Masyarakat yang lebih spesifik dalam pengisian kuesioner karena keterbatasan biaya dan waktu.
4. Pada penelitian ini belum meneliti variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan mengimplementasikan Analisis Standar Belanja (ASB) dengan lebih patuh dalam pengusulan anggaran dan merapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam operasional kegiatan pada instansi atau dinasnya.
2. Bagi Dewan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat supaya lebih menggali aspirasi masyarakat sehingga indikator kinerja yang ditentukan akan lebih tepat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melibatkan masyarakat untuk sampel penelitian tetapi harus dispesifikan masyarakat yang seperti apa.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam penentuan sampel penelitian agar dipilih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) agar tidak terjadi kesenjangan hasil penelitian.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel-variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap penyusunan

APBD berbasis kinerja, misalnya pemahaman prinsip-prinsip penyusunan APBD berbasis kinerja oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), integrasi penganggaran dengan perencanaan dan tata kelola organisasi, Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif, dan Monitoring dan Evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, N. J. & J. P. Meyer. 1997. *Commitment in The Workplace Theory Research and Application*. California: Sage Publications.
- Anggita, Wenni. 2017. Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimum dan Indikator Kinerja Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. *ISSN: 2548-3862 Accountthink Ejournal, Unsika.ac.id*.
- Asropi, 2007, "Membangun *Key Performance Indicator* Lembaga Pelayanan Publik", *Manajemen Pembangunan*, Nomor 57/I/Tahun XVI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta.
- Fitri, Syarifah Massuki, Unti Ludigdo, Ali Djamhuri. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward, dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja. *ISSN: 2085-4277 Jurnal Dinamika Akuntansi, Journal.unnes.ac.id*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryadi. 2015. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Berbasis Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Vol. 4 No. 1*.
- Jumame, Santrinita. Trh, Herman Karamoy dan Agus T Poputra. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Pemerintah Kota Sorong.
- Kurniawan, Arif. 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris Pada DPRD Kota Surakarta Jawa Tengah). *eprints.ums.ac.id1994/21/62*.
- Lubis. 2011. *Akuntansi Keperilakuan Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manik, Rusman. R, 2013. Sekelompok tentang analisis standar belanja. Yogyakarta : Swadaya Mandiri.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

- Oentarto, 2004, *“Menggagas Format Otonomi Daerah Masa depan,”* Samitra Media Utama, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV ALFABETA
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014, Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 59 tahun 2016. Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Ritonga, Taufiq Irwan. (2010). *Analisis Standar Belanja*. Yogyakarta: ISBN
- Robbin and Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi dua belas. Jakarta : Salemba Empat.
- Sembiring, Baik Benar, 2009. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Pemerintah Kabupaten Karo. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sopannah, 2009. *Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*, Universitas Widyagama Malang, SNA XII.
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/2004050/SJ, tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Partisipasi Daerah.
- Suwondo, Ketut. 2000. *Civil society di Aras Lokal*. Pustaka Pelajar, Bandung.
- Tjitrosoemarto, S., 2011. Indikator Kinerja, [Online], <http://www.bappeda.jakarta.go.id/download/IndikatorKinerja.pdf>.

- Werimon, Ghazali dan Nazir.2007, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua)*, SNA X.
- Wilson, R, dan T Sapanuchart.1993, *Primary Health Care Management Advancement Program*. Aga Khan Foundation.